

PENINGKATAN PERILAKU DISIPLIN PESERTA DIDIK MELALUI LAYANAN *CREDIT POINT SYSTEM* (CPS)

Erika Mei Budiarti
Djum Djum Noor Benty

E-mail: meierika09@gmail.com
Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang

Abstract: This research fokus is (1) implementation component of CPS; (2) implementation process of CPS; (3) supporting factors of CPS; (4) obstacle factors of CPS; (5) obstacle factors of implementation CPS solutions. This study used qualitative methode; by case study a site design; Researchers as an instrument of this study; Data sources of this study are the vice principal of students, orderliness team, counselors, students, and security; data were collected through indepth interview, observation, and documentation. The result of this study are (1) implementation component of CPS; (2) implementation process of CPS; (3) supporting factors of CPS; (4) obstacle factors of CPS; (5) obstacle factors of implementation CPS solutions.

Abstrak: Fokus penelitian ini adalah (1) komponen pelaksanaan CPS; (2) proses pelaksanaan CPS; (3) faktor pendukung pelaksanaan CPS; (4) faktor penghambat pelaksanaan CPS; (5) solusi untuk mengatasi faktor penghambat pelaksanaan CPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus tunggal; peneliti sebagai instrumen; sumber data meliputi wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, tim ketertiban, guru BK, peserta didik, dan *security*; teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian meliputi: (1) komponen pelaksanaan CPS; (2) proses pelaksanaan CPS; (3) faktor pendukung pelaksanaan CPS; (4) faktor penghambat pelaksanaan CPS; (5) solusi untuk mengatasi faktor penghambat pelaksanaan CPS.

Kata kunci: implementasi, *credit point system* (CPS)

Disiplin merupakan masalah klasik yang belum sepenuhnya berhasil diterapkan oleh semua orang sampai saat ini. Disiplin diperlukan bagi seorang pendidik dalam membimbing dan mengarahkan anak didiknya supaya dengan mudah dapat (1) meresapkan pengetahuan dan pengertian sosial antara hak milik orang lain; (2) mengerti dan segera menurut untuk menjalankan kewajiban dan secara langsung mengerti larangan-larangan; (3) mengerti tingkah laku yang baik dan buruk; (4) belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa merasa terancam hukum; (5) mengorbankan kesenangan sendiri tanpa peringatan dari orang lain (Lestari, 1990:137).

Berkaitan dengan pembentukan, pembinaan, dan pengembangan kedisiplinan peserta didik, setiap sekolah memiliki aturan dan tata tertib

yang harus dilaksanakan oleh semua komponen sekolah termasuk peserta didik. Tata tertib sekolah merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari yang mengandung sanksi-sanksi terhadap pelanggarannya (Soetopo dan Soemanto, 1982:143). Definisi tersebut menjelaskan bahwa setiap tata tertib yang diberlakukan di sekolah, tentunya masih terdapat beberapa siswa atau komponen sekolah lainnya yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di sekolah. Pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa tidak semua peserta didik melakukan penyimpangan atau pelanggaran.

Strategi atau cara khusus yang dilaksanakan sekolah dimaksudkan untuk mengurangi jumlah pelanggaran-pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh peserta didik sehingga

kedisiplinan dalam diri siswa lambat laun akan terbentuk. Salah satu strategi yang dibuat oleh SMP Negeri 1 Perak dalam meningkatkan perilaku disiplin peserta didiknya adalah penerapan *Credit Point System (CPS)*. *Credit Point System (CPS)* sebagai poin (angka) yang dikenakan kepada siswa atas pelanggaran yang dilakukan terhadap tata tertib sekolah (Waskita, 2010). Definisi tersebut dalam implementasi menjelaskan bahwa poin (angka) yang diberikan oleh sekolah (guru/ bimbingan konseling) kepada siswa bergantung pada pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut. Pelanggaran yang dilakukan digolongkan ke dalam pelanggaran ringan seperti tidak menggunakan atribut sekolah lengkap, datang terlambat, tidak mengerjakan PR hingga pelanggaran yang bersifat berat seperti pemakaian narkoba dan obat-obatan terlarang atau melakukan tindakan asusila yang berakibat pada nama baik sekolah.

Puncak pelanggaran tata tertib yang ada di SMP Negeri 1 Perak yang mengarah pada rendahnya kesadaran disiplin di sekolah ini yaitu adanya kasus-kasus pelanggaran berat pada tahun 2012. Pada tahun tersebut, sekolah seolah-olah menuai *panen raya* pelanggaran. Tawuran antar pelajar antar sekolah maupun antar pelajar SMPN 1 Perak sendiri sering terjadi. Hal ini sulit sekali dikendalikan karena orangtua peserta didik sendiri kurang menyadari akan dampak dari pelanggaran tersebut. Banyak diantara peserta didik yang orangtuanya memang kurang memberikan perhatian sehingga hal tersebut menjadi pemicu adanya kasus tawuran diantara pelajar.

Kenakalan peserta didik di SMPN 1 Perak semakin memuncak ketika terjadi kasus *married by accident* pada tahun 2011 dan terulang lagi kasus hamil di luar pernikahan di tahun 2012. Hal ini menjadi sebuah PR besar bagi pihak sekolah terkait bagaimana sekolah bersikap dalam menghadapi kenakalan peserta didik dan kurangnya sikap disiplin peserta didik terhadap peraturan yang dibuat sekolah.

Menyadari hal tersebut, SMP Negeri 1 Perak mulai menerapkan kebijakan *Credit Point System (CPS)* pada tahun 2012 kepada semua peserta didik yang melanggar tata tertib untuk menanamkan perilaku kedisiplinan dalam diri siswanya. Keunikan dari sistem yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Perak ini adalah

ide ini muncul dari pihak orangtua peserta didik yang sadar akan pentingnya perilaku disiplin. Beberapa orangtua sepakat pada saat rapat bersama seluruh warga sekolah dan wali murid untuk membuat sistem poin kepada peserta didik yang melanggar aturan sekolah. Ide ini muncul ketika sekolah memberikan kesempatan kepada orangtua untuk menyatakan pendapatnya. Munculnya ide ini kemudian ditampung oleh sekolah yang pada akhirnya dipilih sebagai sistem baru dalam menerapkan perilaku disiplin tata tertib kepada peserta didik yang melanggar peraturan sekolah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian deskriptif. Berdasarkan rancangan penelitian yang dilakukan, kehadiran peneliti sangat diperlukan karena peneliti berperan sebagai instrument kunci dalam menggali informasi secara mendalam dan *detail*.

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Perak Kabupaten Jombang yang berada di Jalan Raya Perak Jombang di ujung timur Kecamatan Perak Jombang. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer meliputi menggali informasi dari wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, guru BK, tim ketertiban, peserta didik, dan *security*. Sementara itu data sekunder yaitu berupa dokumentasi, dimana dokumen tersebut kemudia akan dianalisis dan dijadikan sebagai bukti pendukung.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu wawancara, observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data menggunakan tiga tahap yaitu tahap reduksi, penyajian (*display*), dan verifikasi (penyimpulan) data. Tahapan tersebut digunakan untuk memilih dan menyaring informasi yang sesuai dengan fokus penelitian sehingga dapat disimpulkan sesuai dengan informasi yang diperoleh. Pengecekan data juga diperlukan dalam penelitian ini yaitu digunakan untuk memastikan kebenaran dari informasi yang diperoleh mengenai apa yang telah diperoleh oleh peneliti. Pengecekan keabsahan data penelitian ini meliputi tiga kegiatan yaitu, perpanjangan keikutsertaan, triangulasi, dan ketekunan pengamatan. Studi ini juga memiliki tahapan dalam proses penelitian

antara lain tahap persiapan, tahap lapangan, dan tahap penulisan lapangan.

HASIL

Komponen *Credit Point System* (CPS) di SMP Negeri 1 Perak

Credit Point System (CPS) merupakan suatu sistem yang berlaku di SMP Negeri 1 Perak untuk melatih perilaku disiplin peserta didik dalam mentaati peraturan yang telah ditetapkan sekolah. Terdapat banyak komponen dalam sistem ini diantaranya yaitu komponen pelanggaran tata tertib dari segi akhlak dan kepribadian serta komponen sanksi yang terdiri atas bobot poin pelanggaran, jenis tingkatan pelanggaran, dan konsekuensi dari pelanggaran. Masing-masing komponen pelanggaran tata tertib ini memiliki bobot poin yang berbeda-beda apabila peserta didik melanggar.

Perbedaan tersebut bergantung pada pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Penggolongan pelanggaran tersebut terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu pelanggaran berat, sedang dan ringan. Jenjang poin yang ada dalam sistem ini yaitu poin terendahnya 3 (tiga) sedangkan poin tertinggi dalam melakukan pelanggaran adalah 100 (seratus).

Tim ketertiban memiliki cara tersendiri untuk menetapkan poin, sanksi dan predikat pelanggaran sebelum diputuskan. Cara tersebut bergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Apabila peserta didik melakukan pelanggaran yang tidak berdampak pada orang lain maka pelanggaran tersebut digolongkan pada jenis pelanggaran ringan. Berbeda dari hal tersebut, apabila peserta didik melakukan pelanggaran dan dapat memberikan dampak buruk kepada orang lain maka pelanggaran tersebut tergolong dalam jenis pelanggaran yang berat. Keputusan jenis pelanggaran tersebut didapat setelah tim ketertiban melakukan rapat bersama semua guru dan kepala sekolah kemudian diputuskan secara aklamasi.

Proses Pelaksanaan *Credit Point System* (CPS) di SMP Negeri 1 Perak

Terkait dengan pelaksanaan *Credit Point System* (CPS) ini, tim ketertiban memiliki peran

untuk merumuskan, memproses dan memberikan konsekuensi. Sedangkan untuk penyampaian konsekuensi kepada orangtua peserta didik dan menindak lanjuti pelanggaran yang terjadi merupakan tugas dari BK. Tim ketertiban juga mempunyai pembagian tugas masing-masing. Penggolongan tugas dan tanggung jawab tersebut dibagi berdasarkan jenjang kelas, yaitu tim ketertiban kelas VII, VIII, dan kelas IX. Ketiga pembagian tim ini dikoordinatori oleh Bapak Supriyatna selaku koordinator tim ketertiban. Sejalan dengan tugas dan tanggung jawab tim ketertiban, guru Bimbingan dan Konseling (BK) juga mempunyai kontribusi tugas dan tanggung jawab yang penting dalam pelaksanaan CPS ini. Guru BK mempunyai tugas untuk menyampaikan konsekuensi pelanggaran kepada orangtua peserta didik atas pelanggaran yang telah dilakukan putra-putrinya serta tugas dalam hal tindak lanjut pelanggaran.

Proses pelaksanaan *Credit Point System* (CPS) dalam meningkatkan Perilaku disiplin peserta didik di SMPN 1 Perak meliputi: (a) sekolah melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan CPS kepada calon orangtua peserta didik dan calon peserta didik yang mendaftar pada saat proses penerimaan peserta didik baru (PPDB); (b) orangtua peserta didik dan peserta didik yang telah diterima menandatangani surat pernyataan kesediaan melaksanakan CPS; (c) tim ketertiban menemukan pelanggaran yang terjadi. Tim ketertiban memiliki dua cara dalam menemukan pelanggaran yang terjadi, yaitu tim ketertiban menemukan dan mengetahui secara langsung pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik dan tim ketertiban mendapatkan laporan atas pelanggaran yang terjadi dari berbagai pihak (guru, peserta didik, masyarakat); (d) tim ketertiban memproses pelanggaran yang terjadi melalui tahapan berikut: (1) tim ketertiban mengkroscek kebenaran atas pelanggaran yang terjadi kepada beberapa orang yang mengetahui, (2) tim ketertiban memproses bobot poin pelanggaran yang akan diberikan kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran, (3) tim ketertiban mencatat pelanggaran dan bobot poin pelanggaran dalam buku pelanggaran sekolah, (4) tim ketertiban memberikan sanksi kepada peserta didik sesuai bobot poin dan bentuk pelanggaran yang terkumpul, (5) tim ketertiban menyerahkan peserta didik yang melakukan pelanggaran berulang-ulang kepada guru BK, (6) guru BK

melakukan tindakan “penyembuhan” disertai pemberian konsekuensi dari ketetapan CPS, (7) guru BK melakukan pemanggilan orangtua peserta didik yang bersangkutan; (e) sekolah melaksanakan kegiatan evaluasi CPS; (f) sekolah memproses hasil atau *output* pelaksanaan sistem kepada orangtua peserta didik.

Faktor Pendukung Pelaksanaan Credit Point System CPS di SMP Negeri 1 Perak

Pelaksanaan *Credit Point System* (CPS) tidak lepas dari dukungan dan *support* dari berbagai pihak, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Dukungan pihak internal atas pelaksanaan CPS di SMPN 1 Perak berasal dari semua guru dan diri peserta didik sendiri. Semua guru di SMPN 1 Perak memberikan dukungan dalam bentuk peran serta dalam mengawasi pelanggaran yang dilakukan peserta didik. Selain itu antar peserta didik juga memiliki kepedulian untuk saling mengawasi temannya. Lebih lanjut tentang faktor internal yang berasal dari peserta didik, bahwa kesadaran diri dari peserta didik sendiri untuk bersikap disiplin terhadap aturan sekolah merupakan hal yang sangat membantu dalam pencapaian tujuan pelaksanaan CPS di SMPN 1 Perak. Setelah adanya kesadaran diri peserta didik, barulah faktor pendukung selanjutnya berasal dari guru dan orangtua peserta didik diperlukan.

Orangtua peserta didik yang sudah sadar akan pentingnya kedisiplinan dalam pendidikan sangat merespon apabila sekolah menjalankan sistem ini. Disamping itu juga para orangtua sangat berkenan untuk memahami kondisi apabila sekolah sewaktu-waktu memberikan laporan atas pelanggaran yang dilakukan putra-putrinya. Dukungan dari masyarakat eksternal berwujud laporan pelanggaran peserta didik SMPN 1 Perak yang diberikan masyarakat kepada sekolah. Laporan-laporan yang disampaikan biasanya dikarenakan masyarakat mengetahui ada beberapa peserta didik yang membolos pada saat jam pelajaran dan berkeliaran di warung-warung makan sekitar sekolah disertai aktivitas merokok yang dilakukan oleh peserta didik SMPN 1 Perak. Ada juga laporan mengenai peserta didik yang membawa kendaraan bermotor kemudian diparkir di luar sekolah (di rumah warga setempat). Tidak kalah penting dengan peran serta

orangtua peserta didik, peran serta masyarakat sekitar sekolah juga sangat dibutuhkan dalam upaya penegakan disiplin peserta didik di suatu lembaga pendidikan

Faktor Penghambat Pelaksanaan Credit Point System (CPS) di SMP Negeri 1 Perak

Pelaksanaan *Credit Point System* (CPS) di SMP Negeri 1 Perak tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang menghambat jalannya sistem tersebut. Faktor yang menghambat pelaksanaan sistem ini juga berasal dari dua sisi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dapat menghambat pelaksanaan sistem ini yaitu berasal dari diri peserta didik sendiri dan yang kedua berasal dari tim ketertiban. Peserta didik yang melakukan pelanggaran berat cenderung tidak mau terbuka dan berkata jujur manakala tim ketertiban berusaha untuk memproses pelanggaran yang dilakukan. Kendala seperti ini dapat menyulitkan dan menyita waktu tim ketertiban dalam mengusutnya.

Kendala internal lainnya yaitu muncul dari tim ketertiban sendiri. Tim ketertiban dalam hal ini adalah sebagian guru SMP Negeri 1 Perak. Seperti yang diketahui, beban guru untuk mengajar sangatlah banyak. Guru harus melakukan tatap muka satu minggu sekian jam, guru harus menyiapkan bahan mengajar, guru harus menyiapkan perangkat pembelajaran, juga harus mengoreksi hasil pekerjaan peserta didik. Apabila guru ditambah lagi dengan satu tugas sebagai tim ketertiban sekolah, itu berarti menambah lagi beban tugas seorang guru. Apabila CPS dilaksanakan dan pada saat itu terjadi pelanggaran peserta didik yang berat dan bersifat *urgent* untuk diproses, maka seorang guru yang merupakan anggota tim ketertiban tersebut ada di pilihan yang sangat sulit. Guru harus memilih antara meninggalkan kelas dan menunda pekerjaan lainnya sebagai tenaga pengajar atau harus menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik.

Kendala kedua yang bersifat eksternal yaitu berasal dari orangtua peserta didik. Ketika dilakukan pemanggilan orangtua atas pelanggaran yang dilakukan putra-putrinya, sebagian dari mereka bersifat acuh, tidak peduli dan kadang juga ada yang “ngeyel” karena mereka menganggap bahwa putra-putrinya merupakan anak yang

manis, baik, dan penurut ketika berada di rumah sehingga mereka beranggapan hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh putra-putrinya.

Solusi Mengatasi Faktor Penghambat Pelaksanaan *Credit Point System* (CPS) di SMP Negeri 1 Perak

Berkaitan dengan penanggungjawab kendala yang terjadi ketika pelaksanaan CPS ini, tim ketertiban beserta koordinator juga melaksanakan beberapa solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi. Solusi tersebut masing-masing dijalankan sesuai dengan faktor permasalahan yang terjadi. Solusi yang diberikan apabila masalah/kendala yang muncul berasal dari peserta didik yaitu tim ketertiban melakukan beberapa pendekatan melalui beberapa guru yang dianggap dekat oleh peserta didik sehingga peserta didik merasa nyaman dan akhirnya terpancing untuk memberikan keterangan yang jujur atas pelanggaran yang terjadi, solusi ini dirasa praktis untuk dilakukan agar pemrosesan pelanggaran bisa dilakukan secepat mungkin.

Solusi atas permasalahan lain yang berasal dari orangtua peserta didik yang tidak merespon panggilan sekolah yaitu dengan cara memberikan surat panggilan secara berulang-ulang sehingga para orangtua merasa jera yang kemudian berkenan untuk memenuhi panggilan tersebut.

Tidak berhenti dengan kedua hambatan dan solusi yang telah dijabarkan, masalah lain yang juga bisa muncul ketika CPS dilaksanakan juga berasal dari diri tim ketertiban sendiri. Kendala yang muncul adalah kesibukan tim ketertiban sebagai guru yang mana kadang kala harus ditinggalkan karena harus menangani pelanggaran yang dilakukan peserta didik. Hal ini bisa terjadi apabila pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran yang cenderung berat dan bersifat *urgent* yang artinya dapat menimbulkan dampak negatif kepada orang lain. Apabila keadaan terjadi seperti ini, maka biasanya guru yang menjadi anggota tim ketertiban dengan sangat terpaksa harus meninggalkan jam tatap muka di kelas dan hanya akan meninggalkan tugas untuk dikerjakan dan meminta kelas untuk tetap menjaga suasana kelas dalam keadaan kondusif belajar agar tidak mengganggu kelas yang lain.

PEMBAHASAN

Komponen Pelaksanaan *Credit Point System* (CPS) di SMP Negeri 1 Perak

Komponen pelaksanaan CPS yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Perak terdapat beberapa bagian, yaitu komponen jenis pelanggaran yang meliputi pelanggaran akhlak dan pelanggaran kepribadian, komponen sanksi yang meliputi komponen bobot poin pelanggaran, komponen bentuk pelanggaran, serta komponen sanksi. Adanya jabaran bobot poin tersebut bergantung pada pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik, dimana hal ini juga akan berhubungan dengan jenis konsekuensi atau sanksi yang akan diterima oleh peserta didik. Terdapat 3 (tiga) jenis tingkatan pelanggaran yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Jenjang poin yang ada dalam sistem ini juga bervariasi, mulai dari poin terendah 3 (tiga) dan poin tertinggi adalah 100 (seratus). Sementara itu batas toleransi poin pelanggaran yang dimiliki peserta didik yaitu 100 (seratus) poin terhitung selama peserta didik tersebut menjadi peserta didik SMP Negeri 1 Perak.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan yang dipaparkan oleh Didien (2010) bahwa sebagai suatu sistem poin angka dalam tata tertib sekolah yang biasanya tertulis dalam buku tata tertib sekolah, dimana peserta didik akan mendapatkan poin atau angka setiap kali melakukan pelanggaran tata tertib. Sistem ini akan memberikan poin atau angka mulai dari pelanggaran paling ringan seperti penggunaan atribut atau perlengkapan sekolah, datang terlambat, bolos sekolah sampai pelanggaran yang berat seperti kasus tawuran, narkoba dan lain-lain. Teori yang sesuai kedua yaitu berkaitan dengan penetapan kebijakan sistem ini sesuai dengan penjesalan yang dijelaskan oleh Yusransyah (2012) bahwa sistem poin pelanggaran (kartu kuning) merupakan suatu alternatif yang dapat diberlakukan di sekolah sebagai upaya untuk menegakkan disiplin

Pelaksanaan *Credit Point System* (CPS) di SMP Negeri 1 Perak

Dukungan teori untuk pelaksanaan CPS disampaikan oleh Minarti (2011:194) dalam

paparannya bahwa terkait strategi meningkatkan disiplin dan rasa tanggungjawab peserta didik di sekolah, yaitu seorang guru harus menyatakan peraturan dan konsekuensinya. Apabila peserta didik melakukan pelanggaran peraturan yang telah dibuat, maka konsekuensinya dilakukan secara bertahap, dimulai dari peringatan, teguran, memberi tanda cek, disuruh menghadap kepala sekolah, dan atau dilaporkan kepada orangtua tentang pelanggaran yang telah dibuat.

Paparan teori dengan kenyataan lapangan tersebut bisa dilihat dari beberapa kondisi dimana strategi untuk meningkatkan disiplin dan rasa tanggungjawab peserta didik telah diwujudkan dalam pelaksanaan kebijakan CPS oleh sekolah. Semua guru utamanya guru yang tergabung dalam tim ketertiban dan guru BK telah melakukan rapat yang intensif dalam hal pembuatan peraturan sekolah dan penentuan bobot poin pelanggaran serta konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan peserta didik. Pelanggaran yang dilakukan peserta didik akan diproses secara bertahap sesuai kebijakan sistem dimana terdapat tiga kategori bentuk pelanggaran yang dijalankan oleh sekolah. Pelanggaran ringan dengan konsekuensi peringatan lisan dimana batas toleransi bobot poin tingkat ini yaitu 10 (sepuluh) poin, pelanggaran sedang meliputi dua kategori yaitu pelanggaran sedang 1 dengan batas poin 30 (tiga puluh) dikenakan sanksi peringatan tertulis 1 (satu) dan pelanggaran sedang 2 (dua) dengan batas poin 50 (lima puluh) dikenakan sanksi peringatan tertulis 2, serta pelanggaran tingkat berat dengan 4 (empat) kategori yaitu pelanggaran berat 1 (satu) dengan batas poin 70 (tujuh puluh) dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) hari, pelanggaran berat 2 (dua) dengan batas poin 90 (sembilan puluh) dikenakan sanksi skorsing 2 (dua) hari, pelanggaran berat 3 (tiga) dengan batas poin 99 (sembilan puluh sembilan) dikenakan sanksi skorsing 3 (tiga) hari, dan terakhir yaitu pelanggaran berat 4 (empat) dengan batas poin 100 (seratus) dengan sanksi dikembalikan kepada orangtua selamanya.

Pada dasarnya pelaksanaan sistem ini bertentangan dengan salah satu teori pendidikan aliran psikologi behaviorisme yaitu teori *Operant Conditioning* dari Skinner. Penerapan teori ini dalam aktivitas pendidikan yaitu bahwa dalam kegiatan pendidikan tidak menggunakan hukuman, pendidikan bertujuan untuk

mengubah lingkungan agar dapat menghindari tindakan hukuman, tingkah laku yang tidak diinginkan harus diabaikan sedangkan tingkah laku yang diinginkan harus diberikan *rewards (reinforcement)*. Pelaksanaan CPS jelas sekali bertentangan dengan teori tersebut, sebab dalam sistem ini tidak ditemukan adanya *rewards*, bahkan yang ada yaitu sanksi atau konsekuensi dari setiap pelanggaran yang dilakukan peserta didik. Tetapi dalam teori lain dipaparkan bahwa pembinaan perilaku disiplin bisa dilakukan melalui dua cara yaitu dengan melalui pendekatan hukuman (*punitive approach*) dan pendekatan tanpa hukuman (*non punitive approach*). Pelaksanaan CPS di SMP Negeri 1 Perak ini merupakan wujud dari pembinaan perilaku disiplin peserta didik menggunakan pendekatan hukuman atau bisa disebut *punitive approach*.

Faktor Pendukung Pelaksanaan Credit Point System (CPS) di SMP Negeri 1 Perak

Faktor pendukung pelaksanaan CPS untuk meningkatkan perilaku disiplin peserta didik di SMP Negeri 1 Perak berasal dari berbagai pihak, yaitu diri peserta didik sendiri, berasal dari semua guru, orangtua peserta didik, dan masyarakat sekitar. Semua peserta didik saling mengawasi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik lain. Ketika pelanggaran tersebut dilakukan, maka peserta didik yang mengetahui hal tersebut boleh melaporkan kepada tim ketertiban atau guru BK. Sementara itu dukungan lain yang berasal dari guru yaitu adanya sikap peka dari diri guru untuk turut serta mengawasi sikap dan perilaku peserta didiknya. Sama halnya seperti pelapor peserta didik, guru juga diperbolehkan melapor pelanggaran yang terjadi kepada tim ketertiban dan guru BK.

Dukungan selanjutnya yaitu berasal dari orangtua peserta didik dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Sebagian orangtua peserta didik yang sudah sadar akan pentingnya kesadaran disiplin dalam lembaga pendidikan sangat merespon apabila sekolah menjalankan sistem ini. Wujud dukungan lain yang diberikan oleh orangtua peserta didik yaitu adanya respon untuk memahami kondisi apabila pihak sekolah sewaktu-waktu memberikan laporan atas pelanggaran yang dilakukan oleh putra-putrinya. Disisi lain masyarakat sekitar lingkungan sekolah

juga turut serta mendukung pelaksanaan CPS. Dukungan ini berwujud laporan pelanggaran yang diberikan masyarakat kepada sekolah. Laporan-laporan yang disampaikan biasanya dikarenakan masyarakat mengetahui ada beberapa peserta didik yang membolos pada saat jam pelajaran dan berkeliaran di warung-warung makan sekitar sekolah disertai aktivitas merokok yang dilakukan oleh peserta didik SMPN 1 Perak. Ada juga laporan mengenai peserta didik yang membawa kendaraan bermotor kemudian diparkir di luar sekolah (di rumah warga setempat).

Dukungan pelaksanaan CPS di SMPN 1 Perak ini menjawab paparan teori yang disampaikan oleh Supriyanto (1994:15), bahwa, (a) disiplin berangkat dari diri sendiri yang tinggi baik peserta didik maupun pendidik sehingga hal ini menjadi pendukung utama terciptanya disiplin, (b) peraturan-peraturan dan norma-norma yang ditentukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah yang harus dipatuhi dapat mendukung terciptanya disiplin secara umum dan didukung dengan adanya sanksi-sanksi yang jelas dan tegas, (c) kerjasama yang baik antara pendidik dan peserta didik dalam menciptakan suasana disiplin dalam proses pendidikan, (d) lingkungan keluarga sebagai masyarakat kecil yang dimiliki oleh peserta didik sangat mendukung pembentukan sikap disiplin

Faktor Penghambat Pelaksanaan *Credit Point System* (CPS) di SMP Negeri 1 Perak

Pelaksanaan *Credit Point System* (CPS) di SMP Negeri 1 Perak tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang menghambat jalannya sistem tersebut. Faktor yang menghambat pelaksanaan sistem ini juga berasal dari beberapa pihak, yaitu peserta didik, tim ketertiban, dan orangtua peserta didik. Peserta didik yang melakukan pelanggaran berat cenderung tidak mau terbuka dan berkata jujur manakala tim ketertiban berusaha untuk memproses pelanggaran yang dilakukan. Kendala seperti ini dapat menyulitkan dan menyita waktu tim ketertiban dalam mengusutnya. Kendala yang berasal dari tim ketertiban yaitu guru harus memilih antara meninggalkan kelas dan menunda pekerjaan lainnya sebagai tenaga pengajar atau harus menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Tidak jarang biasanya guru

tersebut dengan sangat terpaksa meninggalkan kelas dan menunda pekerjaan yang lain untuk menyelesaikan permasalahan peserta didik yang melakukan pelanggaran.

Kendala selanjutnya yakni berasal dari orangtua peserta didik. Ketika dilakukan pemanggilan orangtua atas pelanggaran yang dilakukan putra-putrinya, sebagian dari mereka bersifat acuh, tidak peduli dan kadang juga ada yang “ngeyel” karena mereka menganggap bahwa putra-putrinya merupakan anak yang manis, baik, dan penurut ketika berada di rumah sehingga mereka beranggapan hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh putra-putrinya.

Faktor penghambat pelaksanaan CPS dalam rangka meningkatkan kesadaran disiplin yang ada di lapangan tersebut lebih luas dari teori yang dipaparkan oleh Supriyanto (1994:15), dimana dalam faktor penghambat dalam proses pembentukan disiplin peserta meliputi, (a) peserta didik mencapai masa puber biasanya mempunyai tingkah laku yang aneh-aneh. Mereka menghendaki bebas seperti orang dewasa. Sedangkan mereka masih lamban untuk menerima tanggung jawab orang dewasa, mengatasi hal-hal yang menyinggung perasaan, dan bahkan cenderung menentang aturan, (b) latar belakang rumah tangga masyarakat dan peserta didik yang berbeda sehingga beberapa pengalaman dan kecakapan yang berbeda harus dipertimbangkan.

Solusi untuk Mengatasi Hambatan Pelaksanaan *Credit Point System* (CPS) di SMP Negeri 1 Perak

Lickona (2012:184) dalam teori yang dipaparkannya terkait peran sekolah dalam melatih disiplin moral peserta didik poin (4) dimana sekolah harus menyampaikan rasa peduli dan hormat bagi setiap individu peserta didik dengan mencoba mencari penyebab masalah disiplin dan sebuah solusi yang dapat menolong para peserta didik menjadi seorang yang sukses, serta menjadi seorang anggota yang bertanggungjawab dalam komunitas.

Teori tersebut sesuai dengan kondisi di SMP Negeri 1 Perak bahwasannya sekolah selalu menggali lebih jauh akar penyebab pelanggaran yang terjadi pada diri peserta didik sehingga melalui cara seperti itu, guru BK mampu memberikan

treatment kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran. Lebih jauh lagi, pihak sekolah dalam hal ini tim ketertiban, guru, dan kepala sekolah turut memperhatikan kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan CPS sehingga ketika dilakukan rapat evaluasi ditemukan perbaikan-perbaikan yang sesuai dengan permasalahan. Perbaikan yang dilakukan oleh SMP Negeri 1 Perak ini disebut dengan upaya mengatasi hambatan atau kendala yang terjadi agar tujuan pelaksanaan CPS dalam rangka meningkatkan perilaku disiplin peserta didik bisa tercapai.

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan CPS mengharuskan sekolah untuk sesegera mungkin menemukan solusi dari masing-masing hambatan. Solusi yang dipilih dari hambatan yang terjadi yaitu diantaranya, (a) melakukan pendekatan oleh beberapa guru kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran, (b) memberikan surat panggilan berulang-ulang kepada orangtua peserta didik yang bersikap acuh, (c) pihak sekolah (tim ketertiban dan guru BK) memberikan penjelasan dengan sikap penuh keramahan dan kesabaran, (d) serta tim ketertiban meninggalkan jam tatap muka kelas dan menggantikannya dengan pemberian tugas tambahan kepada peserta didik di kelas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan: (1) komponen pelaksanaan CPS di SMP Negeri 1 Perak terdapat dua komponen yaitu pelanggaran tata tertib dan sanksi. Komponen pelanggaran tata tertib meliputi pelanggaran akhlak dan kepribadian, sedangkan komponen sanksi meliputi jабaran bobot poin, tingkatan jenis pelanggaran, dan jenis konsekuensi, (2) pelaksanaan CPS di SMP Negeri 1 Perak meliputi kegiatan sosialisasi saat PPDB oleh orangtua, orangtua memberikan tanda tangan di surat pernyataan kesediaan melaksanakan CPS, tim ketertiban menemukan pelanggaran yang terjadi, tim ketertiban memproses pelanggaran yang terjadi, pihak sekolah memproses *output* kepada orangtua peserta didik, serta adanya kegiatan evaluasi yang dilaksanakan sekolah, (3) faktor pendukung pelaksanaan CPS yaitu kesadaran diri peserta didik akan pentingnya sikap disiplin untuk

mematuhi tata tertib sekolah, peran serta semua guru SMPN 1 Perak dalam mengawasi pelanggaran yang dilakukan peserta didik, respon positif orangtua peserta didik ketika sekolah melakukan pemanggilan atas pelanggaran yang dilakukan putra-putrinya, peran serta masyarakat sekitar dalam memberikan laporan ketika pelanggaran terjadi, (4) faktor penghambat pelaksanaan CPS di SMP Negeri 1 Perak yaitu peserta didik bersikap tertutup ketika proses penggalian informasi atas pelanggaran yang dilakukan, kesulitan guru untuk membagi waktu antara tugas sebagai guru dan tugas sebagai tim ketertiban, dan munculnya respon negatif orangtua peserta didik ketika sekolah melakukan pemanggilan atas pelanggaran yang dilakukan putra-putrinya, (5) solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi yaitu sekolah melakukan pendekatan beberapa guru kepada peserta didik yang melanggar, sekolah memberikan surat panggilan berulang-ulang kepada orangtua peserta didik yang bersikap acuh, sekolah memberikan penjelasan dengan sikap yang penuh kesabaran, keramahan, dan ketelatenan, tim ketertiban meninggalkan jam tatap muka di kelas dan menggantinya dengan tugas tambahan kepada peserta didik

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah: (1) bagi Kepala SMPN 1 Perak, sebaiknya kegiatan evaluasi sistem setiap tahun harus diagendakan secara lebih matang oleh pihak sekolah. Bahkan apabila diperlukan, evaluasi pelaksanaan sistem bisa dilakukan dua kali dalam satu tahun ajaran, yaitu setiap semester. Hal ini agar kendala-kendala yang dihadapi oleh tim ketertiban dalam menangani kasus pelanggaran peserta didik bisa secara langsung diatasi, (2) bagi Waka Kesiswaan, Tim Ketertiban, dan Guru BK SMPN 1 Perak, sebaiknya membuat variasi pelaksanaan CPS misalnya yaitu mengadakan rapat evaluasi adanya poin penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi di samping hanya poin pelanggaran yang telah berjalan, (3) bagi Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan, sebaiknya Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan diharapkan agar jurusan dapat lebih luas lagi dalam mengkaji tentang manajemen peserta didik di sekolah, khususnya berkaitan dengan manajemen sikap

dan perilaku bukan hanya terkait manajemen prosedural peserta didik selama menjadi siswa di suatu sekolah, (4) mahasiswa Administrasi Pendidikan, setelah membaca penelitian ini, mahasiswa AP diharapkan dapat menemukan ide-ide baru dalam rangka penegakan dan pembiasaan perilaku disiplin peserta didik yang dapat diujicobakan di sekolah yang lain, (5) bagi Peserta Didik, diharapkan lebih meningkatkan lagi perilaku disiplin sehingga tidak ada lagi kasus pelanggaran aturan tata tertib sekolah yang dapat membawa dampak negatif bagi diri sendiri dan lingkungan, (6) bagi Orang Tua Peserta Didik, peneliti menyarankan kepada orang tua peserta didik agar orang tua dapat mendukung pelaksanaan sistem ini secara penuh dengan cara bekerja sama yang baik dengan pihak sekolah, (7) bagi Peneliti lain, berdasarkan nilai pentingnya sikap dan perilaku khususnya karakter disiplin peserta didik di sekolah, disarankan kepada peneliti yang akan datang untuk menyempurnakan teori hasil penelitian yang telah ditemukan, sehingga diharapkan dapat menambah dan mengembangkan kajian ilmiah utamanya tentang manajemen peserta didik yang telah ada dalam penelitian ini serta dapat dijadikan masukan baru bagi kelanjutan penelitian di masa yang akan datang.

DAFTAR RUJUKAN

- Didien. 2012. *School Corner-Credit Point*, (online), (<http://omdidien.com/school-corner-g/>), diakses 20 Januari 2015.
- Lestari, V. 1990. *Membina Disiplin Anak*. Jakarta : PT Pondok Press.
- Minarti, S. 2011. *Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Soetopo, H & Soemanto, W. 1982. *Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Supriyanto, A. 1994. Strategi dalam Menanamkan Pendidikan Disiplin. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 94 (4): 9-19.
- Waskita. 2010. *Poin Pelanggaran Siswa*, (online), (<https://waskitamandiribk.wordpress.com/2010/08/23/poin-pelanggaran-siswa/>), diakses pada tanggal 15 Januari 2015.
- Yusransyah, M. 2012. *Menegakkan Disiplin Siswa*, (online), (<http://blogpendidikanbahasa.blogspot.com/2012/08/menegakkan-disiplin-siswa-melalui.html#.VLzHnb9HIU>), diakses 15 Januari 2015.